BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan pembiayaan.¹

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi.²

Masalah korupsi di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara.³ Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya

¹ H. Muzadi, *Menuju Indonesia Baru, Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2014, hal. 22

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hal. 1.

³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 1.

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*).⁴

Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crimes*, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan

1. Masalah korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 2. Korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
 3. Kebocoran APBN selama 4 (empat) Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh. Konsekuensi logis dari keadaan demikian, maka korupsi telah melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara Republik Indonesia.
 4. Penengakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.
- Kelima, korupsi di Indonesia merupakan hasil kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta. Dan justru menurut penelitian tersebut

⁴ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 28.

pemberantasan korupsi jenis ini merupakan yang tersulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor publik.⁵

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera dibenahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.

Korupsi di Indonesia begitu parah, mengakar, bahkan sudah membudaya. Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara⁶.

Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia yang lain pun tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan

⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hal. 4-5.

⁶ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2013, hlm ix.

masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.

Gambaran terjadinya praktik korupsi di Indonesia setidaknya tercermin dalam indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan beberapa lembaga survei, diantaranya Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dan *Politically and Economic Risk Consultancy* (PERC). Survei yang dilakukan oleh *Transparency International* menunjukkan skor Indonesia sangat rendah dan tidak mengalami kenaikan signifikan sampai dengan tahun 2010.9 PERC bahkan menempatkan Indonesia menjadi negara terkorup di Asia Pasifik pada tahun 2009 dan 2010.

Korupsi ditempatkan sebagai salah satu kejahatan terorganisasi dan bersifat transnasional berdasarkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) atau Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi pada tahun 2000, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Modus operandi korupsi telah menyatu dengan sistem birokrasi hampir di semua negara termasuk dan tidak terbatas pada negara-negara di Asia dan Afrika, dan dilakukan secara besar-besaran oleh sebagian terbesar pejabat tinggi bahkan seorang Presiden seperti di Filipina, Nigeria, dan beberapa negara Afrika lainnya.
2. Korupsi terbukti telah melemahkan sistem pemerintahan dari dalam atau merupakan virus berbahaya dan penyebab proses pembusukan dalam kinerja pemerintahan serta melemahkan demokrasi.

3. Sangatlah sulit pemberantasan korupsi diperangi di dalam sistem birokrasi yang juga koruptif sehingga memerlukan instrumen hukum yang luar biasa untuk mencegah dan memberantasnya.
4. Korupsi tidak lagi merupakan masalah dalam negeri atau masalah nasional suatu negara, melainkan sudah merupakan masalah antarnegara atau hubungan antar dua negara atau lebih sehingga memerlukan kerja sama aktif antara negara-negara yang berkepentingan atau dirugikan karena korupsi. Hal ini disebabkan sangat banyak bukti bahwa aset hasil korupsi ditempatkan di negara yang dianggap aman oleh pelakunya seperti Kepulauan Caymand, Swiss, Austria, dan beberapa negara di Asia dan Afrika. Kecanggihan modus operandi korupsi dan perlindungan aset hasil korupsi yang didukung oleh teknologi informasi modern telah diakui sangat menyulitkan pemberantasan korupsi hampir di semua negara terutama dalam proses pembuktiannya.

Selain pertimbangan tersebut di atas, meluasnya praktik korupsi telah melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Sedemikian besarnya uang negara yang dinikmati oleh para koruptor berarti telah terjadi perampasan hak-hak ekonomi dari rakyat Indonesia. Perang melawan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasannya di Indonesia bukanlah perjalanan yang baru dilakukan. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sebelum tahun 1960-an, dan telah mengalami beberapa kali pergantian undang-undang.

Pergantian undang-undang tentang korupsi secara umum dapat dilihat akibat dari pergeseran atau pergantian sistem politik di Indonesia. Sekalipun pergantian undang-undang telah banyak dilakukan, akan tetapi filosofi, tujuan, dan misi

pemberantasan korupsi tetap sama. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita-cita bangsa dan sekaligus cita-cita pendiri kemerdekaan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), dan diadopsi ke dalam sila kelima Pancasila.

Setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita-cita bangsa. Akan tetapi, sebagai suatu negara hukum, langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandaskan kepada azas kepastian hukum dan juga harus dilandaskan kepada keadilan sebagai cita-cita hukum.⁷

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana.

Dalam hal ini membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana, atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.

Dampak korupsi dan *organized crime* (kejahatan terorganisasi) lainnya yang sangat luas, terutama dari aspek ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat,

⁷ M. Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q-communication, 2016, hal 104.

ditambah pula dengan ongkos melawan berbagai kejahatan begitu mahal, menjadikan aspek penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan upaya menekan tingkat kejahatan, yaitu *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Phychotropic Substances* pada tahun 1988 dan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000, dan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003.

Beberapa negara pun menetapkan undang-undang mengenai perampasan hasil dan instrumen tindak pidana, diantaranya yaitu Pemerintahan Inggris pada tahun 2002, Pemerintahan Australia pada tahun 2002, dan Pemerintahan Selandia Baru pada tahun 2005. Ketentuan baru ini membuka kesempatan yang sangat luas bagi aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana. Ketentuan mengenai perampasan aset sudah lama dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan dalam bentuk represif dan preventif. Upaya represif, tentu saja menyangkut penguasa yang dengan *power*nya, dengan dilandasi aturan yang jelas, aparat yang berwibawa dengan memegang prinsip amanat, terus menerus menekan dan melakukan tindakan-tindakan ketat terhadap hal-hal pada semua lini yang berpotensi untuk terjadinya tindakan korupsi, dengan manajemen yang terorganisir secara baik. Sedangkan upaya preventif, suatu upaya yang sifatnya pencegahan yang dilakukan secara luas, bukan hanya oleh penguasa tetapi juga

oleh rakyat, sehingga tindakan-tindakan yang mengarah kepada penyelewengan atau penyalahgunaan harta yang disebut korupsi tersebut secara gradual dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Teroganisir.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kendala pemberantasan tindak pidana korupsi transnasional?
2. Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional teroganisir?
3. Upaya pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional teroganisir?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Dari penelitian tersebut diharapkan dapat disajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut. Maka penelitian mempunyai tujuan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan secara tegas dalam rumusan masalah, agar dapat mencapai tujuan dari peneliti. Begitu juga penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui kendala pemberantasan tindak pidana korupsi transnasional

2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir.
3. Untuk upaya pemerintah dalam menangani tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir

Adapun di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia serta memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang berhubungan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih kepada pemerintah, maupun praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan permasalahan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir

D. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Teorganisir”**.

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

E. Kerangka Teori

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimanamana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi⁸. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*coruptio*” atau “*corruptus*”, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak-jujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian dan dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat UU) tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Setiap orang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (Undang-undang No. 31 Tahun 1999)*, Jakarta : Mandar Maju, 2009, hal. 7

Athol Moffit, salah seorang ahli kriminologi Australia mengingatkan berbahaya apabila korupsi dilakukan disemua tingkat, ia mengatakan antara lain: “Sekali korupsi dilakukan, apalagi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi, maka korupsi itu akan tumbuh dengan subur. Tiada kelemahan yang lebih besar pada suatu bangsa daripada korupsi yang merembes kesemua tingkat pelayanan umum, korupsi melemahkan garis belakang baik dalam damai maupun dalam perang”.

Makin maraknya tindak pidana korupsi dewasa ini, sehingga dianggap perlu adanya pengaturan terhadap tindak pidana korupsi, mengingat juga sifat dari tindak pidana korupsi yang merupakan *extraordinary crime*. Oleh karena itu pemberantasan korupsi perlu dilakukan antara lain dengan instrumen hukum luar biasa (*extraordinary legal instrument*), sepanjang instrumen hukum yang luar biasa tersebut tidak bertentangan dengan standar yang berlaku secara universal⁵. Ketika UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi dilahirkan, yang menjadi pertimbangan adalah bahwa perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Lalu pada tahun 1999 ditetapkanlah UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan:

1. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan Nasional;
2. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan/perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

3. Bahwa UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Rumusan delik korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 mengoper sebagian besar dari delik korupsi dalam UU No. 3 Tahun 1971, dengan perubahan; memperluas subjek delik korupsi, memperluas pengertian pegawai negeri, memperluas pengertian delik korupsi, memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan Negara, delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, sanksi pidana yang berbeda dengan sanksi pidana Undang-undang sebelumnya, dan diterapkannya sistem pembuktian terbalik terbatas.

Dengan dasar pertimbangan bahwa:

1. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
2. Untuk menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Semua negara di dunia, saat ini memiliki Pandangan yang sama, bahwa korupsi sebagai sebuah kejahatan/tindak pidana, bahkan lingkup tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di suatu wilayah/negara tertentu saja, akan tetapi sekarang ruang lingkungannya sudah luas menjadi kejahatan internasional.

Dikemukakan oleh Basiouni bahwa kejahatan internasional adalah setiap tindakan yang dapat ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah tertentu negara negara peserta, sekalipun di dalamnya terkandung salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana. Pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Palermo Convention tahun 2000 dan UNCAC tahun 2002, dan hal ini juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 7 tahun 2006. Adanya ratifikasi terhadap UNCAC Tahun 2002 membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus menerapkan dalam sistem hukum nasional.

Indonesia sangat berkepentingan dengan ratifikasi UNCAC dalam kerangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang diduga dilarikan ke luar negeri, seperti salah satu kasus BLBI dengan terpidana Hendra Rahardja yang diduga aset - asetnya dilarikan ke Australia. Ironisnya, beberapa negara secara langsung maupun tidak, memberikan perlindungan karena uang yang dibawa oleh koruptor tersebut dapat menambah devisa dan diinvestasikan baik melalui penanaman modal asing langsung (*direct investment*) maupun tidak langsung (*indirect investment*) di negar any.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah baru yang dianggap akan terasa efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dan mengembalikan uang hasil korupsi yang di duga telah dilarikan ke luar

negeri, dengan melakukan kerjasama-kerjasama internasional. Dalam konvensi yang disahkan oleh sidang PBB pada tahun 2003 terdapat ketentuan – ketentuan mengenai *recovery asset* atau pengembalian aset yang dirasa cukup efisien untuk memberantas korupsi. Momentum inilah yang harus segera direspons dan diambil langkah-langkahnya oleh pemerintah Indonesia guna merealisasikannya.

F. Metode Penelitian

Adapun di dalam setiap penelitian untuk penulisan karya ilmiah pasti diperlukan adanya suatu metode sebagai suatu pedoman. Bagian ini dapat menjelaskan bagaimana suatu penelitian harus dilakukan. Metode penelitian yang baik dan benar sangat menentukan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam arti sebenarnya metodologi berasal dari kata “metodos” dan “logos” dimana metodos berarti cara untuk mencapai tujuan, sedang logos berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi metodologi berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau cara-cara yang bersifat ilmiah.⁹

Adapun metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yaitu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan praktek

⁹ Soenaryo, *Metode Research Kesatu*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2010, hal 2

prostitusi anak dengan menggunakan berbagai konsep dan teori yang sesuai dengan sumber data dan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif.

3. Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

b. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

d. Metode Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.